

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dualisme Kinerja Kebijakan: Kesuksesan Presisi Regulasi di Tengah Patologi Fragmentasi Birokrasi (*Silo Effect*)

Dualisme ini juga terlihat secara nyata pada dimensi sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Di satu sisi, regulasi telah menetapkan besaran bantuan yang signifikan, namun penelitian ini menemukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk KJMU sangat rentan terhadap gejolak politik anggaran, terbukti dari pemotongan hampir separuh anggaran pada tahun 2024 (dari kisaran Rp320–360 miliar menjadi Rp140–180 miliar) yang secara langsung menurunkan jumlah penerima dari 19.023 menjadi hanya 7.000–7.900 mahasiswa sebelum akhirnya dikoreksi kembali menjadi 15.649 setelah tekanan publik dan DPRD. Kerentanan fiskal semacam ini bertentangan dengan asas kepastian kebijakan yang seharusnya menjadi jaminan keberlangsungan studi mahasiswa hingga lulus tepat waktu. Di sisi sumber daya manusia, Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) sebagai eksekutor teknis terbukti mengalami kelumpuhan pelayanan pada masa krisis pemadanan data Maret 2024 karena rasio jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok sasaran yang harus dilayani.

Pada level akurasi data, peneliti menyimpulkan bahwa kelemahan arsitektural KJMU bersumber dari setidaknya tiga titik rapuh yang saling berkaitan, yaitu jeda pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak bersifat real-time, fragmentasi basis data lintas instansi (Dinas Sosial, Bappenda, Dukcapil, dan Regsosek Bappenas), serta ketiadaan mekanisme notifikasi dan masa sanggah sebelum penghapusan status kepesertaan dilakukan. Ketiga titik rapuh ini bermuara pada satu akar masalah struktural, yakni posisi P4OP yang hanya berfungsi sebagai pengguna akhir (*end-user*) data tanpa kewenangan untuk melakukan koreksi mandiri, sehingga setiap sengketa data harus melalui jalur birokrasi Dinas Sosial yang memakan waktu hingga berbulan-bulan melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan. Kondisi ini menjelaskan mengapa peristiwa penghapusan data sepihak pada Maret 2024 menjadi titik krisis kepercayaan publik yang paling nyata terhadap implementasi kebijakan ini, sekaligus memperkuat dalil bahwa fragmentasi struktural antarlembaga di hulu birokrasi adalah variabel penentu utama keberhasilan maupun kegagalan KJMU di lapangan.

2. Defisit Transparansi Preventif dan Lahirnya Inovasi Sosial berupa Resiliensi Kelompok Sasaran (*Target Group Resilience*)

Dari perspektif *Good Public Policy Governance*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbukti gagap dan gagal dalam mengelola pilar Transparansi dan Responsivitas; ini mencapai titik nadir saat fase keterkejutan implementasi di awal tahun 2024. Komunikasi yang sangat asimetris digunakan untuk melakukan pepadanan data algoritma DTKS dan pencocokan aset Bappenda,

yang menghasilkan pemangkasan kuota secara sepihak. Sistem peringatan dini atau masa sanggah bagi mahasiswa yang terus berlanjut menunjukkan sifat birokrasi yang otoriter secara administratif. Ini menyebabkan kepanikan, trauma psikologis, dan kehilangan kepercayaan publik terhadap instrumen negara.

Defisit transparansi ini berakar pada dinamika yang terfragmentasi dalam struktur kelembagaan di hulu birokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa pola koordinasi P4OP dengan Dinas Sosial sebagai pemegang otoritas data DTKS tidak setara dan terjadi secara sektoral. Akibatnya, pola silo effect menyebabkan P4OP dan Dinas Sosial saling bertanggung jawab atas anomali data. Kondisi ini sangat berbeda dengan cara koordinasi P4OP di kampus mitra otonom seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kampus-kampus ini menunjukkan sinergi dan respons yang cepat karena adanya disposisi positif dari aparaturnya kemahasiswaan kampus. Kualitas koordinasi yang berbeda di dua pusat birokrasi ini menunjukkan bahwa masalah tata kelola KJMU adalah masalah sistemik pada arsitektur hubungan antarlembaga yang belum memiliki mekanisme integrasi data real-time.

Kekosongan peran negara inilah yang kemudian diisi oleh resiliensi kelompok sasaran melalui kemunculan aktor mediator informal seperti Forum KJMU/ NaraMuda/ Gerakan Seribu Langkah (GSL). organisasi ini secara mandiri menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara, mulai dari menjadi pusat krisis (*crisis center*) yang menampung dan meredam kepanikan mahasiswa, melakukan edukasi teknis secara peer-to-peer mengenai prosedur

sanggahan data, hingga mengorganisasi penyampaian aspirasi secara kolektif kepada P4OP dan DPRD. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ketergantungan pada aktor informal ini menciptakan kerentanan sistemik baru, sebagaimana terlihat dari hilangnya kapasitas koordinasi yang signifikan setelah bubarnya NaraMuda Jakarta pasca kontroversi pemangkasan kuota 2024. Tidak adanya mekanisme kelembagaan formal yang dapat mengambil alih fungsi tersebut menunjukkan bahwa resiliensi kelompok sasaran, meskipun adaptif dan inovatif, bersifat rentan dan tidak dapat dijadikan substitusi permanen bagi tanggung jawab transparansi yang seharusnya dipikul oleh negara.

3. Ambivalensi Paradigma Kebijakan: Disorientasi Antara Instrumen Investasi Pendidikan dan Skema Bantuan Sosial Kaku

Ambivalensi paradigma ini sesungguhnya berbanding lurus dengan dampaknya nyata yang ditemukan pada dimensi aksesibilitas pendidikan tinggi dan mobilitas sosial vertikal. Ketika status kepesertaan stabil, dana sebesar Rp9.000.000 per semester terbukti efektif menutup biaya langsung (UKT) secara penuh melalui sistem auto-debet Bank DKI dan menyalakan dana untuk biaya tidak langsung seperti transportasi, kos, dan kebutuhan akademik, sehingga mahasiswa Desil 1–4 dapat bergeser dari mode survival ke mode akademik. Dampak ini terbukti berjenjang dalam tiga rentang waktu, jangka pendek berupa keberlangsungan studi pada semester berjalan, jangka menengah berupa penyelesaian studi tepat waktu dan masuknya lulusan ke pasar kerja formal, serta jangka panjang berupa potensi pemutusan rantai

kemiskinan antargenerasi mengingat tingkat mobilitas sosial Indonesia yang masih rendah (0,36 menurut Bappenas, 2022). Akan tetapi, manfaat berjenjang ini sepenuhnya bergantung pada stabilitas status kepesertaan, sehingga begitu status seorang mahasiswa diputus akibat kesalahan pepadanan data, seluruh konstruksi manfaat ekonomi dan sosial tersebut runtuh seketika karena pada umumnya keluarga Desil 1–4 tidak memiliki dana cadangan untuk menutupi UKT secara mandiri.

Secara keseluruhan, sintesis dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini menggambarkan sebuah ironi kebijakan, yaitu KJMU memiliki "mesin" regulasi dan digitalisasi yang sangat baik, namun kekurangan "oli" koordinasi lintas instansi yang membuat mesin tersebut dapat berjalan mulus. Faktor pendukung utama bersumber dari disposisi positif aparatur pelaksana di tingkat kampus dan resiliensi aktor informal di tingkat kelompok sasaran, sementara faktor penghambat utama bersumber dari kompleksitas verifikasi data kemiskinan, perubahan kebijakan yang mendadak tanpa komunikasi yang memadai, serta hambatan administratif birokrasi kampus yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem P4OP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akar masalah implementasi KJMU bukanlah pada desain regulasinya, melainkan pada lemahnya tata kelola koordinasi horizontal antarlembaga dan minimnya perlindungan prosedural bagi kelompok sasaran pada saat terjadi perubahan kebijakan, sehingga rekomendasi perbaikan ke depan perlu diarahkan pada penguatan interoperabilitas data dan mekanisme transparansi preventif.

4.2 Saran

1. Rekomendasi Makro-Struktural bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
(Dinas Pendidikan & Dinas Sosial)

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan perlu membahas untuk merundingkan adanya “Sistem Notifikasi Peringatan Dini” Apabila sistem menemukan lonjakan status Desil atau temuan aset baru pada mahasiswa penerima lanjutan (*on-going*), sistem dilarang keras melakukan pemutusan dana (*cut-off*) secara instan selama semester berjalan. Untuk melindungi hak asasi siswa atas pendidikan yang berkelanjutan, negara harus memberikan Grace Period, atau masa sanggah, setidaknya 30 hari kerja, bagi siswa yang membuktikan kondisi kemiskinan sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan petugas Helpdesk P4OP untuk melacak, memverifikasi silang, dan menindaklanjuti anomali data kemiskinan secara real-time di satu meja, serta mengurangi kebanggaan sektoral lintas instansi, institusional *Single Window System* P4OP harus berinovasi dan berbasis data.

2. Rekomendasi Taktis-Operasional bagi P4OP dan Birokrasi Perguruan Tinggi Mitra

Aparatur P4OP harus menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk memberikan pengakuan formal (*legal standing*) kepada organisasi relawan mahasiswa di setiap universitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan rentang kendali (*span of control*) aparatur P4OP dalam mengawasi puluhan ribu mahasiswa di ratusan kampus. Menjadikan mereka sebagai "Mitra Resmi

Lapangan" akan memudahkan P4OP untuk menyebarkan sosialisasi kebijakan dengan bebas. Sebaliknya, legitimasi ini akan memberikan mahasiswa lebih banyak kesempatan untuk bernegosiasi saat mereka meminta penangguhan UKT kepada rektorat karena dana pemerintah belum dibayarkan.

Digitalisasi Verifikasi Akademik Host-to-Host: P4OP dan Perguruan Tinggi Mitra (PTN/PTS) harus menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait integrasi basis data Host-to-Host untuk menghentikan birokrasi pencarian stempel dan "cap basah" dosen yang membutuhkan banyak waktu. Selain itu, *server* P4OP harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data tentang status kemahasiswaan (Aktif/Cuti) dan capaian Indeks Prestasi Akademik.

3. Rekomendasi Akademis bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar diskusi lebih lanjut di bidang Ilmu Pemerintahan atau Studi Kebijakan Publik difokuskan pada penelitian kuantitatif-korelasional karena penelitian ini hanya berfokus pada struktur tata kelola administratif dan dinamika komunikasi lintas aktor selama era transisi regulasi (Pergub 101/2021). Selain itu, untuk mengevaluasi secara empiris keberhasilan terakhir dari kebijakan ini dalam menciptakan mobilitas kelas menengah baru di DKI Jakarta, penelusuran *tracer*, atau penelusuran alumni, diperlukan. Studi ini mengevaluasi daya serap, atau *employability*, lulusan program KJMU di pasar tenaga kerja industri.